



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI

(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, DAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN/BASARNAS)

Tahun Sidang	: 2022 – 2023
Masa Sidang	: V
Rapat	: Ke – 13
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal	: Rabu, 21 Juni 2023
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 10.10 WIB s.d 13.10 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V), Gedung Nusantara DPR RI
Acara	: 1. Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 sampai bulan Mei 2023; 2. Membahas rencana alokasi anggaran menurut fungsi, program dan prioritas anggaran K/L TA 2024 masing-masing unit Eselon I
Ketua Rapat	: Muhammad Iqbal, S.E., M.Com
Sekretaris	: Nunik Prihatin Budiastuti, SH
Hadir Anggota	: ... Orang dari 55 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra	: Sekjen, Irjen, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi beserta jajaran.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pada pukul 10.10 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Pejabat Eselon I Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi pada hari ini adalah membahas evaluasi pelaksanaan APBN TA 2023 sampai bulan Mei 2023 dan membahas rencana alokasi anggaran menurut fungsi, program dan prioritas anggaran K/L TA 2024 masing-masing unit Eselon I.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Pejabat Eselon I Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

1. Terkait dengan evaluasi pelaksanaan APBN TA 2023, Komisi V DPR RI meminta Setjen; Itjen; BPSDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; dan Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk meningkatkan penyerapan anggaran sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023, dimana capaian per 16 Juni 2023 sebagai berikut:

No.	Unit Organisasi Eselon I	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
1.	Sekretariat Jenderal	40,89%	44,88%
2.	Inspektorat Jenderal	41,98%	46%
3.	BPSDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	37,54%	38,29%
4.	Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	41,44%	49,90%

2. Komisi V DPR RI memahami penjelasan Sekjen; Irjen; Kepala BPSDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; dan Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi mengenai rincian program dan alokasi Pagu Anggaran untuk Eselon I dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

Dalam Ribu Rupiah

NO	UNIT ORGANISASI ESELON I	PAGU KEBUTUHAN TA 2024	PAGU INDIKATIF TA 2024	SELISIH/ BACKLOG
		A	B	A-B
1.	Sekretariat Jenderal	305.854.907	226.010.691	79.844.216
2.	Inspektorat Jenderal	53.700.000	39.122.128	14.577.872
3.	BPSDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	2.127.627.951	1.695.120.909	432.507.042
4.	Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	180.957.336	141.274.780	39.682.556

3. Komisi V DPR RI sepakat dengan Sekjen; Irjen; Kepala BPSDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; dan Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk menyesuaikan rincian program dan menyempurnakan RKA K/L masing-masing Eselon I dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2024, sesuai dengan saran dan pendapat serta usulan Komisi V DPR RI yang disampaikan dalam rangkaian proses pembicaraan pendahuluan RAPBN TA 2024.

4. Komisi DPR RI meminta/ Hal.3

4. Komisi V DPR RI meminta BPSDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja dan output tenaga pendamping desa serta melaporkan hasilnya kepada Komisi V DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.10 WIB.

Jakarta, 21 Juni 2023

KETUA RAPAT,



MUHAMMAD IQBAL

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI,



TAUFIK MADJID

INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI,



TEGUH

PIh KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SDM DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DDTT
KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRASMIGRASI,



M ASNAWI SABIL

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN INFORMASI
DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI,



IVANOVICH AGUSTA